

TANTANGAN INTEGRASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENDIDIKAN FORMAL

Rosmita Hapsun¹, Chairunnisa Djayadin²

Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, Indonesia¹²

Email: rosmitahapsun@gmail.com, chairunnisadjayadin.uin@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the challenges of integrating Islamic educational values into formal education policies in Indonesia. The method used is a library research analysis of various scientific sources from 2019 to 2025. The results of the study indicate a disconnect between normative policies and implementation in the field, the dominance of cognitive aspects in the curriculum, and the limited capacity of teachers to integrate Islamic values effectively. Political dynamics and rapid regulatory changes also influence the direction and consistency of education policies. The lack of professional training, weak values-based evaluation, and a lack of structural support also hinder the integration process. This study concludes that strengthening the integration of Islamic values requires synergy between policymakers, educators, and the community. A contextual approach that is adaptive to local social and cultural conditions is also needed so that Islamic values can be instilled in a holistic, relevant, and sustainable manner within the formal education system. This can be an effective means of instilling Islamic values in a comprehensive and sustainable manner..

Keywords: Islamic education, educational policy, value integration

(*) Corresponding Author: Rosmita Hapsun/rosmitahapsun@gmail.com

PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang sarat perubahan, pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk individu yang cerdas, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan zaman. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang dijamin konstitusi untuk memperoleh pendidikan yang layak, tanpa diskriminasi atas dasar agama, suku, ekonomi, maupun gender. Pendidikan bukan hanya wahana untuk memperkuat aspek akademik, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam menumbuhkan karakter, moralitas, dan identitas kebangsaan (Filiansi et al., 2024).

Dalam kerangka kebangsaan, sistem pendidikan nasional di Indonesia dibangun atas prinsip inklusivitas dan pemerataan. Berbagai kebijakan seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, serta wacana moderasi beragama dirancang untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman serta keragaman budaya bangsa (Sumilat & Pangalo, 2024). Namun, meskipun regulasi

sudah dirumuskan secara normatif, tantangan besar muncul dalam menerjemahkan nilai-nilai luhur seperti toleransi, keadilan, religiositas, dan budaya lokal ke dalam praktik pendidikan formal yang nyata.

Disisi lain, pelaksanaan kurikulum nasional lebih dominan pada penguatan aspek kognitif. Penelitian Rasyid dan Wihda (2024) menunjukkan bahwa dimensi afektif dan nilai-nilai sosial kerap terpinggirkan. Kurikulum saat ini belum sepenuhnya mendukung pengembangan karakter dan sikap peserta didik, sehingga aspek pembinaan kepribadian menjadi kurang maksimal.

Lebih lanjut, pelaksanaan pendidikan karakter masih bersifat simbolik dan belum menyentuh transformasi sikap secara mendalam Filiansi et al. (2024). Banyak sekolah mengalami hambatan dalam menerapkan nilai-nilai secara utuh, antara lain karena tingginya beban administratif, keterbatasan pelatihan bagi guru, serta kurangnya dukungan dari lingkungan sosial. Kesenjangan antara regulasi formal dan implementasi di lapangan semakin memperjelas bahwa nilai-nilai luhur yang dicantumkan dalam kebijakan seringkali tidak terinternalisasi dalam kegiatan belajar mengajar. Guru dan tenaga pendidik menghadapi tantangan besar dalam mengaitkan nilai-nilai seperti kebhinekaan dan toleransi dengan konteks keseharian siswa. Setiyawati et al. (2024) menyebutkan bahwa faktor keterbatasan kapasitas pendidik turut menghambat proses internalisasi nilai dalam pendidikan formal.

Kondisi ini diperburuk dengan belum memadainya pelatihan guru untuk mengintegrasikan nilai secara kontekstual. Guru sebagai ujung tombak pendidikan seringkali tidak memiliki keterampilan pedagogis yang memadai untuk mengaitkan nilai-nilai keislaman dengan realitas sosial yang dihadapi siswa. Kurangnya pendekatan kreatif dan relevan menyebabkan pembelajaran nilai menjadi kurang efektif dan tidak membekas dalam perilaku peserta didik.

Permasalahan lain yang mencuat adalah desain kebijakan yang terlalu seragam, tanpa mempertimbangkan kebutuhan lokal yang berbeda-beda. Ketika nilai-nilai universal seperti toleransi dan keadilan disampaikan dengan pendekatan yang kaku dan tidak kontekstual, maka kemungkinan besar pesan pendidikan tidak diterima dengan baik oleh peserta didik.

Kebijakan pendidikan nasional sejatinya telah memberi ruang untuk pembinaan nilai, namun dalam pelaksanaannya kerap tidak berkelanjutan. Banyak sekolah belum memiliki perencanaan konkret untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kurikulum, kegiatan pembelajaran, dan budaya sekolah. Hal ini menjadikan upaya integrasi nilai berjalan secara parsial dan tidak menyentuh akar persoalan karakter.

Selain itu, peran serta masyarakat dan lingkungan sekitar sekolah belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung penguatan karakter siswa. Padahal, partisipasi aktif orang tua, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sangat diperlukan agar penanaman nilai tidak berhenti di ruang kelas, tetapi juga mengakar dalam kehidupan sehari-hari siswa.

Faktor politik juga memberikan pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan pendidikan. Sabilla Febriany dan Anggraeni Dewi (2021) menyoroti bahwa politisasi kebijakan pendidikan mengaburkan nilai-nilai substansial yang seharusnya menjadi fondasi utama. Pendidikan seringkali dijadikan alat

kepentingan kekuasaan, yang membuat pelaksanaan program karakter tidak konsisten dan mudah berganti sesuai arah pemerintahan yang berkuasa..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kajian pustaka (*library research*) sebagai metode utama dalam pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini dipilih karena dinilai relevan untuk mengeksplorasi isu-isu konseptual dan normatif seputar integrasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan formal. Kajian pustaka memungkinkan peneliti untuk menelusuri dan memahami pemikiran-pemikiran teoritis serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

Menurut Zed (2021), studi pustaka merupakan aktivitas ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan cara menelaah berbagai sumber informasi tertulis guna memperoleh data yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik. Dalam konteks penelitian ini, proses kajian dilakukan melalui langkah-langkah identifikasi, seleksi, telaah kritis, serta sintesis terhadap sumber-sumber yang mendukung tema pembahasan.

Sumber data yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah, artikel dalam jurnal terakreditasi, laporan kebijakan, dokumen peraturan perundang-undangan, serta publikasi resmi dari lembaga pemerintah seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Fokus pencarian literatur diarahkan pada karya-karya yang diterbitkan dalam rentang waktu 2019 hingga 2025, guna memastikan keterkinian dan relevansi data dengan dinamika kebijakan pendidikan nasional saat ini.

Penelusuran sumber dilakukan melalui berbagai platform digital seperti Google Scholar, Garuda, DOAJ, dan SINTA, dengan kata kunci yang mencakup: "integrasi nilai pendidikan Islam", "pendidikan karakter", "kebijakan pendidikan nasional", dan "implementasi kurikulum". Sumber yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan fokus pada isi dan relevansi substansi terhadap permasalahan penelitian.

Analisis difokuskan pada pemetaan konsep, kebijakan, serta hambatan implementasi integrasi nilai-nilai pendidikan dalam kebijakan pendidikan formal. Penelitian ini berupaya untuk mengungkap hubungan antara regulasi normatif dan tantangan implementatif di lapangan, khususnya dalam konteks pembentukan karakter dan internalisasi nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan Indonesia.

Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil kajian dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan, baik dalam pengembangan teori pendidikan Islam maupun sebagai referensi praktis bagi pemangku kebijakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya wacana akademik mengenai pentingnya integrasi nilai dalam membangun sistem pendidikan yang humanis, religius, dan kontekstual sesuai dengan karakter kebangsaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kesenjangan Kurikulum dan Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Kurikulum nasional saat ini masih dominan berorientasi pada aspek kognitif dan penguasaan akademik. Hal ini menyebabkan dimensi afektif dan spiritual yang merupakan inti dari pendidikan Islam menjadi kurang diperhatikan. Seperti yang disampaikan oleh Rasyid dan Wihda (2024), orientasi terhadap hasil tes dan capaian akademik membuat nilai-nilai moral hanya menjadi pelengkap yang tidak terintegrasi secara utuh. Padahal dalam Islam, pendidikan bertujuan membentuk insan yang berkarakter, tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga secara akhlak.

Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan formal masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi kebijakan, pelaksana, maupun konteks sosial-politik.

Implementasi Nilai yang Bersifat Simbolik

Filiansi et al. (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah-sekolah masih bersifat simbolik. Kegiatan keagamaan atau pembiasaan baik yang dilaksanakan tidak diikuti dengan internalisasi yang mendalam terhadap nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Sering kali kegiatan tersebut hanya menjadi formalitas administratif yang tidak mampu mendorong perubahan sikap peserta didik secara signifikan.

Minimnya Kesiapan Guru sebagai Agen Integrasi Nilai

Guru sebagai ujung tombak dalam integrasi nilai-nilai Islam menghadapi berbagai hambatan. Sopiah (2019) mengungkapkan bahwa masih banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan memadai untuk mengintegrasikan nilai-nilai dalam proses pembelajaran. Pendekatan yang digunakan masih bersifat normatif dan satu arah, sehingga kurang mampu membentuk diskusi kritis dan refleksi mendalam pada siswa.

Pengaruh Dinamika Politik terhadap Konsistensi Kebijakan Pendidikan

Politisasi kebijakan pendidikan seringkali menyebabkan arah kebijakan bergantung pada rezim yang sedang berkuasa. Menurut Sabilla Febriany dan Anggraeni Dewi (2021), perubahan orientasi politik berimplikasi pada tidak konsistennya program integrasi nilai. Program yang telah dijalankan sebelumnya bisa dihentikan atau diganti tanpa adanya evaluasi berkelanjutan, sehingga tujuan pembentukan karakter menjadi terhambat.

Pendekatan Kebijakan yang Tidak Kontekstual terhadap Keberagaman

Setiyawati et al. (2024) menegaskan bahwa keragaman budaya, etnis, dan agama di Indonesia menuntut kebijakan pendidikan yang lebih kontekstual. Namun, dalam praktiknya, kebijakan bersifat seragam dan top-down, sehingga kurang menjangkau kebutuhan dan dinamika lokal. Pendekatan ini memicu resistensi dan kesulitan dalam penanaman nilai secara efektif, terutama di wilayah dengan kearifan lokal yang kuat.

Lemahnya Evaluasi dan Partisipasi Stakeholder

Yusgiantara et al. (n.d.) mengungkapkan bahwa evaluasi pendidikan nilai masih lemah, karena belum ada instrumen yang efektif untuk menilai aspek sikap

dan karakter. Guru lebih fokus pada capaian akademik yang dapat diukur secara kuantitatif. Selain itu, keterlibatan orang tua, tokoh masyarakat, dan lingkungan sekitar sekolah dalam penguatan karakter juga masih minim. Padahal pendidikan karakter memerlukan sinergi antara sekolah dan masyarakat agar nilai yang diajarkan dapat terus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari (Siskawati Noi, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai pendidikan islam dalam kebijakan pendidikan formal di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang perlu diatasi secara sistematis dan kontekstual.

1. Terkait rumusan masalah pertama mengenai kesesuaian kurikulum dengan nilai-nilai pendidikan islam:
 - a. kurikulum nasional masih berorientasi pada capaian kognitif, sehingga dimensi afektif dan spiritual yang menjadi fondasi pendidikan islam kurang mendapat perhatian. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealism pendidikan islam dan implementasi kurikulum saat ini.
 - b. Terkait rumusan masalah kedua mengenai pelaksanaan kebijakan integrasi nilai disekolah:
 - c. Implementasi nilai dilapangan cenderung bersifat simbolik dan administratif. Aktivitas yang dilakukan belum mampu mendorong perubahan perilaku siswa secara nyata, akibat minimnya pendekatan pedagogis yang substansial dan reflektif.
2. Terkait rumusan masalah ketiga mengenai peran pendidik:
 - a. Guru menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan nilai secara utuh karena kurangnya pelatihan dan keterbatasan metode pembelajaran. Tanpa peningkatan kapasitas guru nilai-nilai islam akan sulit di tanamkan secara efektif.
3. Terkait rumusan masalah keempat tentang pengaruh dinamika politik:
 - a. Politisasi pendidikan menciptakan ketidakpastian kebijakan. Pergantian orientasi politik sering menyebabkan ketidakkonsistenan program integrasi nilai, sehingga tujuan pembentukan karakter tidak berkelanjutan.
4. Terkait rumusan masalah kelima mengenai relevansi kebijakan terhadap keberagaman:
 - a. Pendekatan kebijakan yang seragam belum mampu menjangkau kompleksitas social budaya Masyarakat di Indonesia. Akibatnya integrasi nilai kerap tidak efektif saat diterapkan di daerah dengan kondisi lokal yang berbeda.
5. Terkait rumusan masalah keenam mengenai evaluasi dan dukungan stakeholder:
 - a. Evaluasi nilai masih terbatas dan belum memiliki indicator yang mampu mengukur aspek karakter secara holistic. Selain itu, keterlibatan orang tua dan Masyarakat masih minim padahal sinergi

antara sekolah dan lingkungan sangat penting untuk keberhasilan internalisasi nilai.

Secara keseluruhan untuk mewujudkan pendidikan formal yang mampu menginternalisasi nilai-nilai pendidikan islam secara efektif, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang kontekstual, pelatihan guru yang berkelanjutan, keterlibatan Masyarakat, serta sistem evaluasi yang menyeluruh dan adil. Dengan demikian pendidikan tidak hanya mencetak peserta didik yang cerdas tetapi juga berkarakter, religious, dan kontributif terhadap Masyarakat..

DAFTAR PUSTAKA

- Filiansi, M., Lapasere, S., Rizal, R., Wahyuni, S., & Pahriadi, P. (2024). Peran Guru dalam Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 8(3), 1781–1792. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i3.7454>
- Rasyid, R., & Wihda, K. (2024). Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Dunia Pendidikan. 8(2), 1278–1285. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i2.7355>
- Sabilla Febriany, F., & Anggraeni Dewi, D. (2021). Nilai-Nilai Pancasila dan Dinamika Etika Politik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(04), 690–695. <https://doi.org/10.59141/japendi.v2i04.139>
- Setiyawati, D., Harsan, T., & Rahayu, M. H. S. (2024). Strategi Penguatan Karakter Kebhinekaan Global Dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 11(3), 742–753. <https://doi.org/10.38048/jipcb.v11i3.3634>
- Siskawati Noi, A. L. M. (2024). INTEGRITAS PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI ERA DIGITAL. *JPSS: Jurnal Pendidikan Sang Surya*, 10(2), 542–549. <https://doi.org/10.56959/jpss.v10i2.318>
- Sopiah, Y. (2019). STRATEGI MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU DALAM MENYUSUN RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN HARIAN MELALUI BIMBINGAN BERKELANJUTAN. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 5(1), 45–50. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v2i2.46>
- Sumilat, J. M., & Pangalo, L. C. (2024). Pengaruh Kurikulum Merdeka terhadap Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. *Journal on Education*, 6(4), 21326–21333. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6282>
- Yusgiantara, A., Gunarsih, A. I., & Khuriyah, S. B. (n.d.). Inovasi Pendidikan Karakter Berbasis Kurikulum : Pendekatan Holistik untuk SD , SMP , dan SMA di Era Digital. 0738(4), 6023–6030. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1901>
- Majid, A. (2011). Strategi dalam Menyusun Rencana Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Zed, M. (2021). Tinjauan Pustaka: Panduan Praktis. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.